



INDEKS KEMALAHAN KONSTRUKSI KABUPATEN KAUR TAHUN 2018



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR

<https://kab.kab.bps.go.id>



INDEKS
KEMALAHAN KONSTRUKSI
KABUPATEN KAUR
TAHUN 2018



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN KAUR 2018

ISSN/ISBN :
Nomor Publikasi : 17040.1724
Katalog BPS : 4102002.1704
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : vi + 38 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Gambar kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Dicetak Oleh :
CV. Remayang Jaya Advertising

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

TIM PENYUSUN
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN KAUR TAHUN 2018

Penanggung Jawab:

Ir. Chamsiah Hidayani

Penyunting Layout:

Ropika Yuta, SST

Penulis Naskah:

Ferdinand David Aritonang, SST

Perwajahan Kulit:

Ferdinand David Aritonang, SST

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2019 ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur dapat menerbitkan publikasi **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur 2018**.

IKK Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan atau jawaban dalam salah satu variabel kebutuhan fiskal yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari survei serentak perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi tahun 2018 dengan sumber data dari para pedagang besar/distributor, pedagang eceran, kontraktor, Dinas Pekerjaan Umum serta instansi terkait lainnya.

Kepada semua pihak yang telah ikut membantu terwujudnya penghitungan IKK sampai terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Kaur, Oktober 2019
Kepala BPS Kabupaten Kaur,

Ir. Chamsiah Hidayani

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data	5
2.2. Kegiatan Pengumpulan Data	6
2.3. Kuesioner yang Digunakan	7
2.4. Pemilihan Kualitas	7
2.5. Konsep dan Definisi.....	7
2.6. Metode Pengolahan Data	10
2.7. Metode Pengitungan IKK	10
2.8. Metode Analisis	15
BAB III PEMBAHASAN	17
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur	17
3.2. Gambaran Kependudukan	21
3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan	21
3.4. Diagram Timbang Umum IKK	23
3.5. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2017	27
BAB IV KESIMPULAN	33
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Wilayah per Kecamatan, di Kabupaten Kaur Tahun 2018	20
Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2015-2018 (dalam Ribu Rupiah).....	26
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2013-2018	28
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018	29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Lokasi Kabupaten Kaur	18
Gambar 2. Kondisi Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Kaur Tahun 2018.....	22
Gambar 3. Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kaur Tahun 2018.....	23
Gambar 4. Proporsi Alokasi Belanja Modal Berdasarkan Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2018.....	24
Gambar 5. Proporsi Alokasi Belanja Menurut Fungsi Berdasarkan Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2018.....	25
Gambar 6. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur, 2018.....	35
Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Pembiayaan, Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas di Kabupaten Kaur, 2014-2018 (km)	36
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2015-2018	37
Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2015-2018	38

BAB 1

Latar Belakang:

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Pemerintah pusat melalui Dirjen Perimbangan Keuangan memberikan DAU (Dana Alokasi Umum dan DAK (Dana Alokasi Khusus)



**Tujuan Publikasi
IKK**



**Dana Alokasi
Umum**



**Dana Alokasi
Khusus**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut direalisasikan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai pembangunan fisik maupun non fisik yang tersebar sampai pelosok wilayah yang sekaligus secara bertahap diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Pembangunan fisik yang tersebar merata diharapkan dapat membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial baik antar daerah maupun antar masyarakat.

Pembangunan fisik berupa gedung-gedung perkantoran, tempat ibadah, maupun tempat untuk kegiatan sosial masyarakat di berbagai bidang terus mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan gerak roda perekonomian daerah. Dalam rangka mendukung semua keberhasilan pembangunan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan otonomi daerah yang ditujukan agar pembangunan dapat dirasakan merata dan adil di seluruh wilayah. Disamping itu, kebijakan otonomi daerah dapat juga mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah dengan tujuan utama yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengisyaratkan bahwasanya sebagian besar urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tersebut, maka kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dengan besarnya kewenangan tersebut maka pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Kewenangan pembangunan yang besar oleh pemerintah daerah ini disebut desentralisasi pembiayaan. Kewenangan ini diatur melalui UU No. 25 tahun 1999 mengenai pengaturan keuangan pusat dan daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sampai sekarang ini, salah satu sumber pendapatan utama daerah kabupaten/kota adalah DAU. Selama beberapa tahun terakhir pun, DAU juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Kaur dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Agar pembagian DAU ke daerah kabupaten/kota menjadi adil, proporsional, dan merata maka perlu adanya dukungan data yang valid, akurat dan terkini sebagai data dasar dalam penghitungan DAU yang didasarkan pada azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan lima variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPS yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini BPS merupakan penyedia data untuk empat komponen diantara lima komponen kapasitas fiskal penghitungan DAU. Data yang disediakan BPS untuk penghitungan DAU adalah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tingkat kabupaten/kota dan propinsi seluruh Indonesia. DAU dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal antar daerah, dimana kesenjangan fiskal merupakan selisih antara potensi dan kebutuhan daerah. Indikator-indikator pokok yang kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Jumlah Penduduk (IP), Indeks Luas Wilayah (IW), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks PDRB perkapita (IPP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu indikator penting yang menunjukkan kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Pentingnya IKK ini ditunjukkan oleh bobot penghitungannya dalam

2 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kaur Tahun 2018

penghitungan DAU yang sangat besar. Dalam penghitungan tingkat kebutuhan fiskal daerah pada alokasi DAU 2016, IKK memiliki peran yang sama dengan jumlah penduduk, memiliki bobot tiga kali lipat dari IPM dan dua kali lipat dari bobot IPP dan IW.

$$\text{DAU}_{i, 2018} = \text{Belanja Rata-rata Realisasi APBD}_{2016} (0,3 \text{ IP}_{2017} + 0,15 \text{ IW}_{2017} + 0,3 \text{ IKK}_{2017} + 0,15 \text{ IPP}_{2017} + 0,1 \text{ IPM}_{2017})$$

Dari kelima variabel pada penghitungan DAU di atas terlihat bahwa jumlah penduduk dan kemahalan harga barang/jasa konstruksi memiliki bobot atau peran paling besar dalam menentukan tingkat kebutuhan fiskal suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa selain data jumlah penduduk maka data lain yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh suatu daerah adalah data harga barang-barang konstruksi. Oleh karena itu, sebagai daerah kabupaten yang sedang giat-giatnya membangun, Kabupaten Kaur sangat membutuhkan data harga barang-barang konstruksi yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penghitungan IKK yang berimplikasi pada besaran DAU untuk tahun-tahun mendatang.

Dari keempat data yang dibutuhkan dalam penghitungan DAU, angka IKK dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena, itu diperlukan adanya pengumpulan data dari lapangan untuk melengkapi dan memperbaharui data sebelumnya. Dalam hal ini peranan BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota sangat besar khususnya dalam proses pengumpulan data dari lapangan yang lengkap dan terkini.

Peranan BPS kabupaten/kota dalam hal ini BPS Kabupaten Kaur selain dalam pengumpulan data dari lapangan juga berperan untuk mensosialisasikan pentingnya data IKK kepada Pemerintah Kabupaten Kaur, sehingga data tersebut dapat memberi manfaat yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Kaur khususnya dalam penetapan nilai/biaya suatu bangunan konstruksi.

1.2. Tujuan

Dalam rangka optimalisasi manfaat IKK bagi Pemerintah Kabupaten Kaur upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis IKK Kabupaten Kaur untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti :

1. Memberikan gambaran komponen-komponen penyusun Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2018;
2. Mengetahui berapa nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2018;
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
4. Merupakan salah satu ukuran yang dapat menjadi starting point bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kaur pada tahun-tahun yang akan datang; dan
5. Untuk membantu pengambil kebijakan, peneliti atau konsumen data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Kaur secara lebih spesifik.

BAB 2 METODOLOGI



IKK dihitung di 514 kabupaten seluruh Indonesia. Menghitung 47 komoditas dan 3 kelompok jenis bangunan



Responden terdiri atas: pedagang besar, produsen, pedagang eceran, kontraktor, dan dinas Pekerjaan Umum (PU)



Daftar kuesioner yang digunakan adalah daftar VIKK 2018.



Pemilihan Kualitas di dalam komoditas IKK ditentukan oleh BPS RI



Di dalam Survei IKK terdapat beberapa konsep dan definisi yang membantu di dalam pencacahan



Pengolahan Data meliputi pemeriksaan data, editing coding, entri data, tabulasi dan validasi data



Azaz pemilihan paket komoditas:
1. Comparability
2. Representativeness
3. Trade of Caomparability vs representativeness



Diagram Timbang di dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum



Metode Analisis di dalam IKK menggunakan analisis deskriptif berupa penyajian tabel dan grafik

BAB II

METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota 2018 disusun berdasarkan jumlah kab/kota yang definitif yaitu 514 Kabupaten Kota, sedangkan IKK Provinsi dihitung di 34 Provinsi. Untuk penghitungan IKK Provinsi menggunakan data harga rata-rata dari seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Harga bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang hasil pertambangan/penggalian dan barang-barang hasil industri pengolahan, dan jasa sewa alat berat.

Sumber data utama dalam penghitungan angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ini menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, dan sebagai data pendukung adalah data sekunder dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Data primer yang diambil di BPS didapat melalui survei yang dikenal dengan Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi Tahun 2018 dengan 47 komoditas dan 3 kelompok jenis bangunan, sedangkan data sekunder sebagai data bobot/timbangan IKK kabupaten/kota dan provinsi berasal dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur, yakni realisasi belanja daerah APBD Kaur tahun 2017 dan *Bill of Quantity* (BOQ) proyek yang telah selesai yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur.

2.2. Kegiatan Pengumpulan Data

Untuk keperluan penghitungan IKK 2018 dilakukan survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi dan sewa alat berat yang menjadi paket komoditas IKK. Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota (514 kabupaten/kota) di 34 provinsi di Indonesia. Informasi yang ditanyakan adalah harga bahan bangunan, sewa alat-alat berat dan upah jasa konstruksi seperti yang terdapat pada kuisisioner survei. Survei serentak ini dilakukan empat kali dalam setahun yaitu pada tanggal 20-30 bulan Januari, Juli, dan Oktober dan 10-20 April. IKK tahun 2018 menggunakan data hasil survei periode pencacahan akhir Juli 2017, periode akhir Oktober 2017, periode akhir Januari 2018 dan periode akhir April 2018.

Responden survei terdiri dari beberapa kategori yaitu pedagang besar/distributor, pedagang campuran, produsen, pedagang eceran, dan kategori lainnya seperti : kontraktor, dinas PU atau instalasi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, dan upah pekerja).

Pemilihan responden diutamakan pedagang besar (PB), jika tidak ada PB maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas yaitu dari pedagang campuran, produsen, dan pilihan terakhir yaitu pedagang eceran (PE). Pedagang campuran adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar. Jumlah sampel untuk setiap komoditas adalah 1-3 responden. Dari jumlah sampel ini diharapkan dapat melengkapi isian kuesioner.

Pencacahan dalam survei ini dilakukan dengan cara kunjungan dan wawancara langsung terhadap responden terpilih pada periode pencacahan. Jika tidak memungkinkan untuk wawancara langsung, maka kuesioner bisa ditinggal kepada responden untuk kemudian diambil kembali paling lambat keesokan harinya. Pada saat kuesioner diambil seyogyanya isian pada daftar tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan daftar isian telah terisi dengan baik dan benar.

2.3. Kuesioner yang Digunakan

Untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan dan sewa alat berat paket komoditas IKK digunakan satu kuesioner/daftar yaitu daftar VIKK2018. Daftar ini digunakan untuk mencatat harga 47 paket komoditas bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi.

2.4. Pemilihan Kualitas

Agar hasil pengumpulan data harga dalam survei ini sesuai dengan kebutuhan data harga seperti yang tertuang dalam daftar VIKK2018, maka perlu dilakukan pemilihan kualitas sebagai berikut:

1. Kualitas terpilih harus kualitas yang telah ditentukan oleh BPS Pusat, yaitu kualitas umum yang biasanya ada di seluruh kabupaten/kota dan tertulis dalam pilihan daftar VIKK2018 sebagai pertanyaan tertutup. Contoh :
 - a. Jenis barang : semen Abu-abu
 - b. Kualitas : Tiga Roda 50 kg, Tiga Roda 40 kg
2. Apabila kualitas jenis barang atau bahan bangunan/konstruksi tidak tersedia dalam pilihan dalam kuesioner VIKK2018, maka pilih kualitas yang setara dan dominan digunakan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan satuan standar yang tertulis dalam daftar VIKK2018 dalam isian yang terbuka. Contoh, apabila di daerah pencacahan tidak terdapat data harga cat kayu isi 1 kg dengan kualitas/merk Glotex, maka pilih kualitas yang setara dengan cat kayu Glotex tersebut dengan mengisi isian yang kosong/terbuka yang tersedia. Ukuran kesetaraan ini dapat dilihat dari kualitas/mutu maupun harganya.

2.5. Konsep dan Definisi

Kualitas hasil pengumpulan data dalam survei ini sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman petugas pengumpul data (pencacah) tentang konsep dan definisi

dari beberapa istilah yang digunakan dalam pelaksanaan survei ini. Istilah-istilah dan konsep yang perlu dipahami tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Harga perdagangan besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.
2. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.
3. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.
4. **Harga pedagang campuran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara partai/grosir dan juga menjual barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.
5. **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
6. **Produsen** adalah penghasil barang-barang baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin.
7. **Pedagang Besar (PB)** adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.
8. **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.
9. **Pedagang Besar Pertama (PB I)** adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil.
10. **Party/grosir atau jumlah besar** yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai

dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.

11. **Kegiatan Konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan pembangunan baru. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, sedangkan kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.
12. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit/jam.
13. **Excavator** adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke dalam kendaraan truk.
14. **Buldozer** adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.
15. **Three Wheel Roller (Mesin Giling)** adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau mengeraskan permukaan jalan.
16. **Dumptruck**, sudah jelas.
17. **Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang.
18. **Kepala Tukang** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
19. **Tukang batu** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan *water pass*.

20. **Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.
21. **Tukang cat** adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya.
22. **Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik dan perlengkapannya dan memasang sistem listrik generator, trafo, dll.

2.6. Metode Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer atau software yang meliputi tahapan :

- a. Pemeriksaan data
- b. *Editing coding* (penyuntingan data dan pengkodean)
- c. *Entry data* (perekaman data)
- d. Validasi dan tabulasi data

2.7. Metode Penghitungan IKK

Sebelum metode penghitungan IKK dijelaskan, perlu pula dipahami mengenai konsep dan definisi. Beberapa konsep dan definisi yang perlu dipahami adalah mengenai kegiatan konstruksi dan klasifikasi jenis bangunan.

Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pembangunan baru, perluasan, renovasi/pemugaran, pemeliharaan/perbaikan, pembongkaran, penyiapan lahan (tidak termasuk pembelian lahan/tanah). Kegiatan konstruksi ini dibedakan/kelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan/konstruksi, yaitu:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian;
3. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan;

4. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi;
5. Bangunan lainnya

Kemudian konsep dan definisi dari kelima jenis bangunan tersebut adalah :

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
 - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi : rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 - b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi : konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi : pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi : bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
3. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi : pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi : pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
4. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi : pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.

- c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi : bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi : instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
 - f. Instalasi listrik, meliputi : pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 - g. Instalasi gas, meliputi : pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
 - h. Instalasi listrik jalan, meliputi : instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
 - i. Instalasi jaringan pipa, meliputi : jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
5. Bangunan lainnya, meliputi : bangunan sipil, pembangunan lapangan olah raga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

Selanjutnya dalam penghitungan IKK Kabupaten/Kota atau Provinsi dibutuhkan beberapa data penunjang, yaitu: paket komoditas, diagram timbang, dan harga bahan-bahan bangunan yang dominan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK.

2.7.1. Paket Komoditas

Yang dimaksud dengan paket komoditas IKK adalah suatu keranjang atau paket yang mencakup sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang cukup dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2018 diperkirakan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 47 komoditas bahan bangunan, seperti: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi,

aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang dan sewa alat berat, yaitu: *excavator, bulldozer, loader, tandem/Vibrating roller* (mesin gilas), *dumptruck, motor grader, asphalt finisher, generator set (Genset)*, serta upah.

Azaz pemilihan paket komoditas adalah :

1. *Comparability* (keterbandingan)
2. *Representativeness* (mewakili)
3. *Trade off comparability vs representativeness*

Selanjutnya tahapan dalam pemilihan paket komoditas IKK adalah :

- Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan maka cari kualitas yang setara.
- Spesifikasi/kualitas barang setiap periode pencacahan harus sama.
- Jenis barang yang dicatat harganya merupakan barang *ready stock*, harus benar-benar diperdagangkan di kabupaten/kota itu sendiri kecuali untuk barang-barang natural. Pencacahan barang natural (pasir, batu pondasi, batu split, batu bata, batako, dan kusen) tidak harus *ready stock*

2.7.2. Diagram Timbang

Diagram Timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/upah jasa yang dibutuhkan untuk membangun satu unit jenis bangunan per satuan ukuran luas. Data kuantitas/volume bahan bangunan tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang umum IKK adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan yang akan digunakan untuk menghitung IKK umum.

Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data realisasi APBD ini dapat diperoleh dari Pemerintah Kab/Kota. Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2018 digunakan data Realisasi APBD tahun 2017. Dari data APBD tersebut dipilih pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan.

2.7.3. Formula Penghitungan

- a. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (TKKKab)_j

$$TKK Kab_j = \sum_{i=1}^m P_i \cdot Q_{ij}$$

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

j = kelompok jenis bangunan j

P_i = harga jenis barang/bahan bangunan i

Q_{ij} = kuantitas/volume bahan bangunan i dan kelompok jenis bangunan j

- b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata nasional (TKKNas)_j

$$TKK Nas_j = \frac{\sum_{k=1}^n TKK Kab_j}{n}$$

n = total kabupaten di Indonesia ($n = 491$)

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (IKKKab)_j

$$IKK Kab_j = \frac{TKK Kab_j}{TKK Nas_j} \times 100$$

d. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKKUmumKab)

$$IKKUmum Kab = \sum_{j=1}^5 IKK Kab_j \cdot Q_i$$

Q_i = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

2.8. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk mempermudah analisis tabel-tabel dan grafik secara sederhana sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan dari obyek penelitian. Dalam publikasi ini, analisis tersebut digunakan untuk menginterpretasikan angka IKK Kabupaten Kaur, jika dibandingkan dengan angka IKK Kab/Kota lain di Provinsi Bengkulu dan angka nasional (standar).

Beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam analisis IKK tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. IKK 2012-2018 disajikan dengan menentukan salah satu ibukota propinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. IKK tahun 2018 ini menggunakan Kota Semarang sebagai kota Acuan.
2. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK nya literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

BAB III PEMBAHASAN

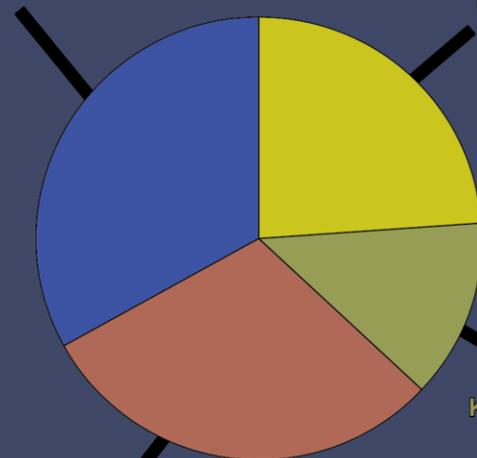
IKK Kabupaten di Provinsi Bengkulu Tahun 2018



IKK Kabupaten Kaur Tahun 2018 sebesar 96.91. Kota Semarang menjadi kota acuan dengan IKK sebesar 100

Kondisi Jalan Kabupaten Kaur Tahun 2018

Kondisi Rusak Berat
33%



Kondisi Baik
24%

Dari Total 578 540 km di Kabupaten Kaur sebanyak, kondisi jalan baik ada sepanjang 137 047 km atau 24 %, sedangkan kondisi jalan sedang sepanjang 77 144 km atau 13%, kemudian kondisi jalan rusak sepanjang 173 678 km atau 30%, dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 190 671 km atau 33%

Kondisi Sedang
13%

Kondisi Rusak
30%

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003. Ibukota kabupaten ini adalah Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan dengan jarak tempuh 250 km dari Kota Bengkulu atau merupakan kabupaten terjauh kedua setelah Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu..

Secara astronomis Kabupaten Kaur terletak pada posisi $4^{\circ} 15' 8,21''$ – $4^{\circ} 55' 27,77''$ Lintang Selatan (LS) dan $103^{\circ} 4' 8,76''$ – $103^{\circ} 46' 50,12''$ Bujur Timur (BT). Kondisi astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kaur beriklim tropis atau Iklim A karena terletak antara 0° – $23\frac{1}{2}^{\circ}$ LS. Pada tahun 2018, tercatat suhu udara rata-rata di Kabupaten Kaur mencapai $26,86^{\circ}\text{C}$, kelembaban udara sebesar 84,08, rata-rata tekanan udara mencapai 1.010,25 mb dengan rata-rata curah hujan mencapai 326,5 mm.

Musim yang terjadi di Kabupaten Kaur sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Desember-Maret) dan musim kemarau (Juni-September) sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan/pancaroba.

Secara geografis Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, termasuk dalam wilayah administrasi paling selatan Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berjarak sekitar 250 km dari ibukota Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Lampung ke arah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, secara administrasi Kabupaten Kaur berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

- Sebelah selatan : Kabupaten Pesisir Barat (pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat), Provinsi Lampung;
- Sebelah barat : Samudera Hindia; dan
- Sebelah timur : Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1.
Peta Lokasi Kabupaten Kaur



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Undang-undang tersebut dan surat Mendagri No. 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, luas wilayah daratan Kabupaten Kaur mencapai 2.365 km² atau 236.500 Ha, panjang garis pantai 89,17 km dan luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai seluas 660,59 km².

Topografi wilayah Kabupaten Kaur terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu :

1. Jalur *Low Land* (dataran rendah) dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Wilayah yang termasuk dalam Jalur *Low Land* mencapai 9% atau 20.889 hektar. Kecamatan yang termasuk ke dalam Jalur *Low Land* adalah Kecamatan

Tanjung Kemuning, Semidang Gumay, Kaur Utara, Tetap, Kaur Selatan, Maje dan Nasal.

2. Jalur Bukit *Range* dengan ketinggian 100 – 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Bukit *Range* mencapai 61% atau 144.026 hektar. Semua kecamatan di Kabupaten Kaur sebagian wilayahnya ada yang masuk katagori jalur ini.
3. Jalur Pegunungan dengan ketinggian > 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Pegunungan mencapai 30% atau 71.585 hektar. Di Kabupaten Kaur, yang termasuk ke dalam jalur ini adalah kawasan Bukit Barisan.

<https://kaurkab.bps.go.id>

Tabel 1.

Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2018

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nasal	Merpas	519,92
2.	Maje	Linau	361,04
3.	Kaur Selatan	Bintuhan	92,75
4.	Tetap	Tetap	87,4
5.	Kaur Tengah	Tanjung Iman	26,40
6.	Kinal	Kinal	154,03
7.	Semidang Gumay	Mentiring	64,91
8.	Muara Sahung	Ulak Lebar	256,00
9.	Luas	Benua Ratu	124,88
10.	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning	72,91
11.	Lungkang Kule	Sukananti	32,00
12.	Kaur Utara	Simpang Tiga	49,80
13.	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun III	370,64
14.	Padang Guci Hilir	Gunung Kaya	115,96
15.	Kelam Tengah	Rigangan I	35,84
Kabupaten Kaur		Bintuhan	2.365,00

Sumber : BPS Kabupaten Kaur

Pada tahun 2003 di awal pembentukannya, Kabupaten Kaur memiliki tujuh kecamatan induk, yaitu Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Kinal, Kaur Tengah,

Tanjung Kemuning dan Kaur Utara. Namun, hingga tahun 2018 jumlah kecamatan di Kabupaten Kaur sudah berjumlah lima belas kecamatan yang terdiri atas 192 desa dan tiga kelurahan.

3.2. Gambaran Kependudukan

Pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Kaur diperkirakan mencapai 119.951 jiwa yang terdiri dari 62.004 laki-laki dan 57.947 perempuan dengan rasio jenis kelamin 107. Ini artinya, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Kaur terdapat 107 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 2.365,00 km², kepadatan penduduknya mencapai 50 sampai 51 jiwa per km².

Sebaran penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten ini tidak merata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kelam Tengah dengan tingkat kepadatan 192,35 jiwa per km² dan Kecamatan Kaur Tengah dengan tingkat kepadatan 184,15 jiwa per km², sedangkan kecamatan paling jarang adalah Kecamatan Padang Guci Hulu dengan kepadatan 19,92 jiwa per km².

3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan

Indeks Kemahalan konstruksi (IKK) dihitung dengan mengumpulkan sejumlah harga komoditi di bidang konstruksi. Salah satu hal yang berpengaruh dalam membentuk harga di suatu wilayah antara lain ketersediaan barang dan jasa dan kelancaran pendistribusian barang ke wilayah tersebut. Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa diperlukan sarana penunjang berupa sarana transportasi maupun infrastruktur jalan.

Media transportasi di Kabupaten Kaur masih mengandalkan transportasi darat dalam mendistribusikan barang dan jasanya. Alat transportasi roda empat belum mengalami perkembangan yang tinggi. Perkembangan jumlah transportasi darat yang terus mengalami perkembangan adalah kendaraan roda dua atau motor.

Pada tahun 2018, infrastruktur jalan darat yang menghubungkan antar wilayah di kabupaten ini terbentang sepanjang 653,494 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 85,25 km, jalan provinsi sepanjang 120,30 km, dan jalan kabupaten sepanjang 447.944 km.

Gambar 2.
Kondisi Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Kaur Tahun 2018

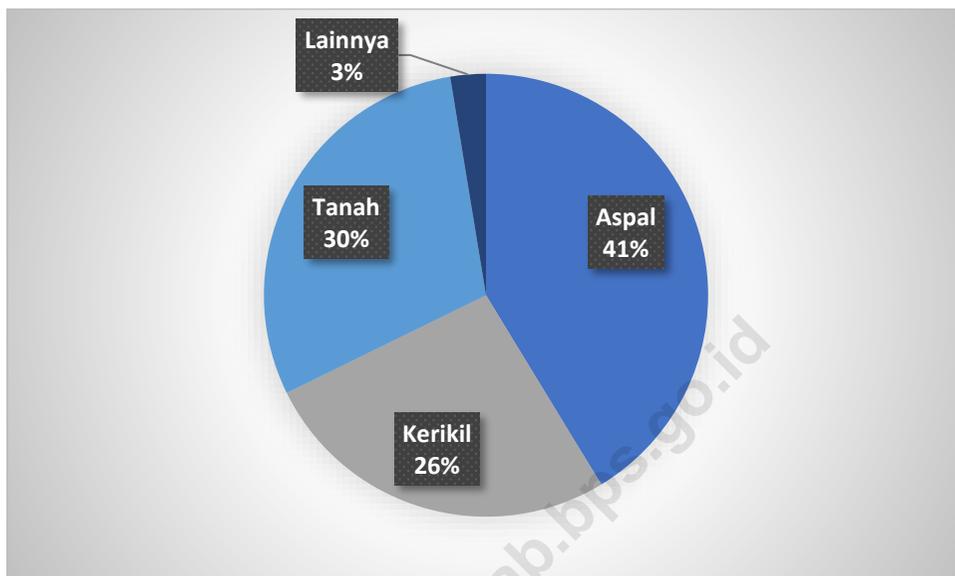


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Persentase jalan menurut kondisi di Kabupaten Kaur tahun 2018, dari total 578.540 km panjang jalan di Kabupaten Kaur, 137.047 km (24 persen) merupakan jalan baik, 77.144 km (13 persen) merupakan jalan sedang, 173,678 km (30 persen) merupakan jalan rusak, dan jalan kondisi rusak berat sepanjang 190.671 km (33 persen).

Gambar 3.

Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kaur Tahun 2018



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Berdasarkan gambar 3, Panjang jalan di Kabupaten Kaur tahun 2018 sepanjang 578.540 km, persentase jalan permukaan yang diaspal sepanjang 239.002 km (41 persen), jalan permukaan yang kerikil sepanjang 152.829 km (26 persen), jalan dengan kondisi permukaan tanah sepanjang 171.761 km (30 persen), dan lainnya sepanjang 14.948 km (3%).

3.4. Diagram Timbang Umum IKK

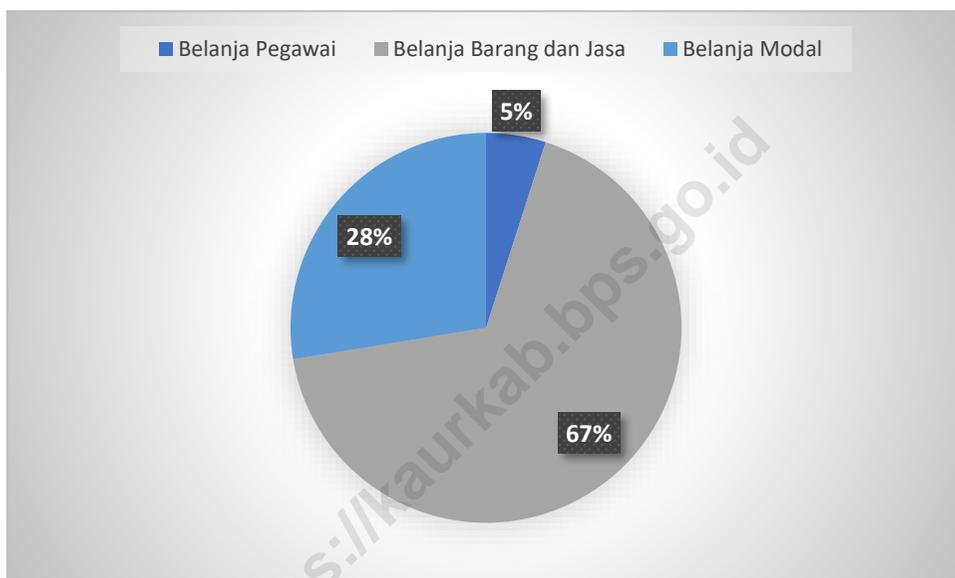
Kabupaten Kaur termasuk kabupaten yang tergolong baru di Indonesia. Sebagai kabupaten baru, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kaur adalah pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Kaur telah mengalokasikan sebagian anggaran pendapatannya guna melakukan pembangunan fisik baik berupa bangunan gedung, infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan pertanian, dan sebagainya.

Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur tahun 2018, dari total belanja langsung pemerintah daerah

Kabupaten Kaur 5 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, 67 persen untuk belanja barang dan jasa dan 28 persen untuk belanja modal.

Gambar 4.

Proporsi Alokasi Belanja Operasi Berdasarkan Realisasi APBD Kabupaten Kaur tahun 2018

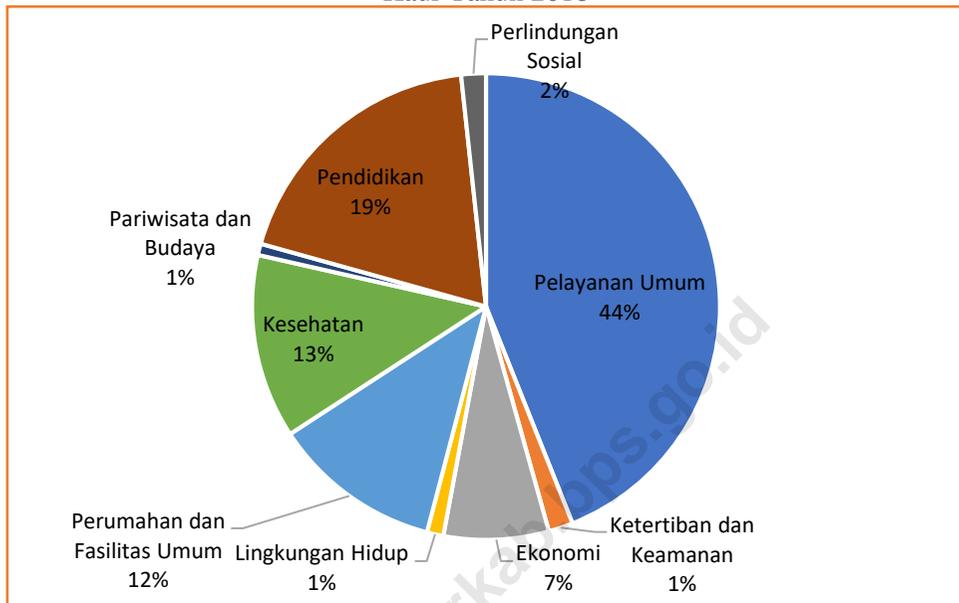


Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kaur telah mengalokasikan anggaran belanja menurut fungsi berdasarkan realisasi APBD Kabupaten Kaur tahun 2018. Di tahun 2018, realisasi terbesar ada pada belanja pelayanan umum sebesar 44 persen, pendidikan sebesar 19 persen, dan kesehatan 13 persen. Untuk proporsi belanja terkecil adalah belanja untuk lingkungan hidup 1 persen, ketertiban dan keamanan 1 persen, pariwisata dan budaya 1 persen, dan perlindungan sosial 2 persen. Besaran belanja menurut fungsi di tahun 2018 sebesar Rp 737,95 miliar.

Gambar 5.

Proporsi Alokasi Belanja Menurut Fungsi Berdasarkan Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2018



Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur

Kebutuhan akan keuangan daerah menjadi suatu syarat pembangunan fisik dapat berjalan lancar. Dengan kondisi Kabupaten Kaur yang merupakan kabupaten pemekaraan yang belum lama berdiri sudah selayaknya pemerintah daerah untuk dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kaur 2015-2018 (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Daerah	732.181,85	900.896,17	766.260,34	750.536,79
1. Pendapatan Asli Daerah	16.379,42	30.022,31	38.132,95	38.688,34
2. Dana Perimbangan	602.451,46	669.635,00	564.143,94	551.555,37
1.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.236,56	20.800,98	13.374,97	12.537,27
1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	393.623,58	441.587,14	433.937,04	435.518,39
1.3. Dana Alokasi Khusus	180.591,32	207.246,88	116.831,93	103.499,7
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	113.350,96	201.238,86	163.983,43	160.293,08

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan membangun wilayahnya, Kabupaten Kaur masih bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Total anggaran pendapatan Kabupaten Kaur pada tahun 2018 sebesar 750,53 milyar rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan sebesar 551.555,37 juta rupiah yang terdiri dari 12.537,27 juta rupiah merupakan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak atau sebesar 2,27 persen, 435.518,39 milyar rupiah merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) atau sebesar 78,96 persen dan 103.499,7 milyar rupiah merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sebesar 18,76 persen dari total pendapatan daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 38.688,34 milyar rupiah.

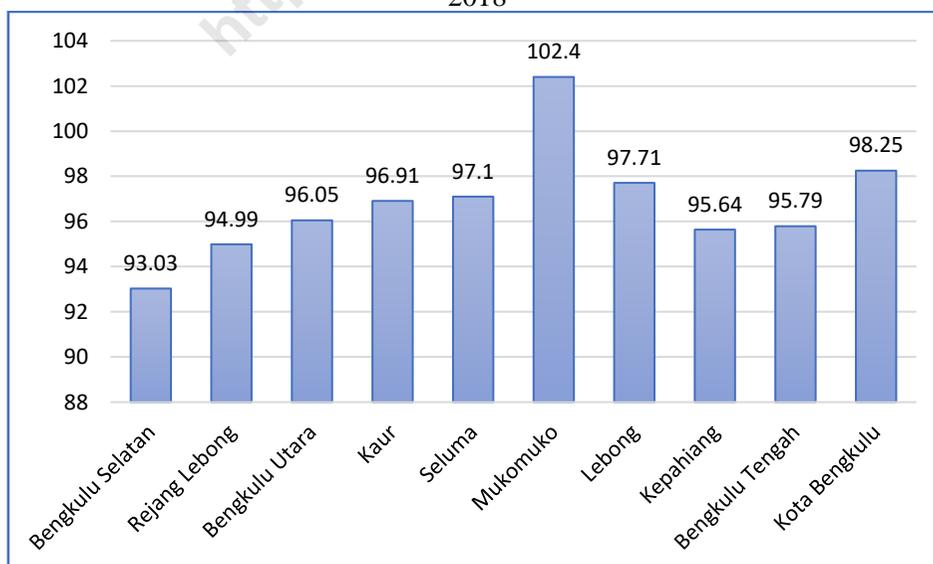
3.5. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2018

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa serta periode pencacahan yang sama sehingga hasilnya *comparable* untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama. IKK tahun 2018 telah dihitung untuk seluruh kabupaten/kota dan 34 Provinsi se-Indonesia, termasuk diantaranya adalah IKK Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Nilai IKK 2018 merupakan salah satu variabel dalam penentuan DAU tahun anggaran 2019.

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK nya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar. Dalam penghitungan IKK 2018, Kota Semarang sebagai kota acuan dengan $IKK = 100$.

Gambar 6.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur pada tahun 2018 sebesar 96,91. Hal ini dapat diartikan harga barang dan jasa konstruksi di Kabupaten Kaur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bengkulu (96,76). Diantara sepuluh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, IKK Kabupaten Kaur menempati peringkat kelima diantara kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Bengkulu, jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Peringkat setelahnya ditempati oleh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 96,05. Kota Bengkulu sendiri sebagai titik awal bagi pendistribusian beberapa jenis barang konstruksi hasil industri ke beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu memiliki nilai IKK sebesar 98,25. Sementara Kabupaten Muko-Muko memiliki nilai IKK paling tinggi, yaitu sebesar 102,4.

Tabel 3.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2013-2018

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BENGKULU SELATAN	94,44	97,98	96,86	93,54	89,64	93,03
REJANG LEBONG	90,67	94,64	94,59	99,26	94,04	94,99
BENGKULU UTARA	93,46	96,76	95,4	94,19	92,02	96,05
KAUR	100,5	103,32	94,35	93,1	90,54	96,91
SELUMA	101,78	102,14	93,35	94,4	92,61	97,10
MUKOMUKO	110,67	112,53	103,05	104,06	102,83	102,40
LEBONG	99,23	98,58	97,12	96,77	94,91	97,71
KEPAHIANG	102,85	103,55	93,56	91,06	90,14	95,64
BENGKULU TENGAH	104,49	102,43	95,1	95,77	91,43	95,79
BENGKULU	100,93	99,45	95,83	99,61	95,26	98,25
PROV. BENGKULU	94,98	96,21	101,64	101,86	93,27	96,76
NASIONAL	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika diurutkan dari terbesar ke kecil, kabupaten Kaur mengalami beberapa fluktuasi peringkat dari tahun 2013 hingga 2018. Jika diurutkan dari besar ke terkecil, pada tahun 2013, nilai IKK kabupaten Kaur sebesar 100,5, Kabupaten Kaur menempati peringkat ke-6. Kemudian pada tahun 2014, nilai IKK Kabupaten Kaur adalah 103,32 dan menempati peringkat ke-3. Setelah itu, mulai dari tahun 2015 hingga 2018, nilai IKK Kabupaten Kaur selalu berada di bawah nasional atau dibawah 100. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, IKK Kabupaten Kaur dari tahun 2015 hingga 2017 selalu berada dibawah IKK Provinsi Bengkulu, sedangkan di tahun 2018, IKK Kabupaten Kaur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian barang-barang konstruksi ke Kaur sudah mulai lancar, sehingga mengurangi biaya ongkos angkut. Faktor tersebut hanya satu dari banyak faktor lainnya dalam menjelaskan fenomena mengenai turunnya angka IKK Kabupaten kaur dalam 4 tahun terakhir. Di tahun 2018, nilai IKK Kabupaten Kaur adalah 96,91 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bengkulu dan Kota Semarang yang digunakan sebagai kota acuan.

Tabel 4.

Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018

No	Kode	Provinsi	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1100	PROV. ACEH	100,39	21
2	1200	PROV. SUMATERA UTARA	101,47	19
3	1300	PROV. SUMATERA BARAT	99,1	25
4	1400	PROV. R I A U	96,86	29
5	1500	PROV. J A M B I	92,53	32
6	1600	PROV. SUMATERA SELATAN	97,64	27
7	1700	PROV. BENGKULU	96,76	30
8	1800	PROV. LAMPUNG	89,31	34
9	1900	PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	99,29	24
10	2100	PROV. KEPULAUAN RIAU	127,7	3

11	3100	PROV. DKI JAKARTA	109,14	11
12	3200	PROV. JAWA BARAT	103,63	15
13	3300	PROV. JAWA TENGAH	98,64	26
14	3400	PROV. DI YOGYAKARTA	104,88	13
15	3500	PROV. JAWA TIMUR	103,86	14
16	3600	PROV. B A N T E N	100,22	22
17	5100	PROV. B A L I	122,95	5
18	5200	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	100,76	20
19	5300	PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	99,79	23
20	6100	PROV. KALIMANTAN BARAT	113,95	8
21	6200	PROV. KALIMANTAN TENGAH	102,31	16
22	6300	PROV. KALIMANTAN SELATAN	105,09	12
23	6400	PROV. KALIMANTAN TIMUR	114,13	7
24	6500	PROV. KALIMANTAN UTARA	113,25	9
25	7100	PROV. SULAWESI UTARA	110,83	10
26	7200	PROV. SULAWESI TENGAH	97,04	28
27	7300	PROV. SULAWESI SELATAN	101,69	18
28	7400	PROV. SULAWESI TENGGARA	101,96	17
29	7500	PROV. GORONTALO	96,46	31
30	7600	PROV. SULAWESI BARAT	91,33	33
31	8100	PROV. M A L U K U	126,39	4
32	8200	PROV. MALUKU UTARA	116,65	6
33	9100	PROV. PAPUA BARAT	134,02	2
34	9400	PROV. PAPUA	227,9	1

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 4 di atas menunjukkan perbandingan IKK antar provinsi di Indonesia. Provinsi Bengkulu memiliki IKK sebesar 96,76. Hal ini menunjukkan bahwa harga bahan bangunan/konstruksi di Bengkulu relatif lebih rendah dibandingkan kota Semarang, karena indeksnya kurang dari 100. Jika melihat IKK di Indonesia terdapat

22 wilayah provinsi yang memiliki tingkat harga bahan bangunan/ konstruksi yang relatif tinggi, hal ini dilihat dari IKK yang lebih dari 100. Adapun lima teratas Provinsi yang memiliki IKK terbesar yaitu Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Maluku, dan Bali.

Kemudian dari IKK Provinsi Bengkulu yang ditunjukkan pada tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa wilayah dengan tingkat harga bahan bangunan/konstruksi yang relatif serupa dengan Provinsi Bengkulu adalah provinsi Gorontalo dan Riau dengan indeks masing-masing sebesar 96,46 dan 96,86. Perbandingan dengan provinsi tetangga, jika IKK Provinsi Bengkulu berada pada posisi ke-30 dengan indeks sebesar 96,76, maka Provinsi Sumatera Selatan berada di posisi ke-27 dengan indeks sebesar 97,64, Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ke-25 dengan indeks sebesar 99,1, Provinsi Lampung berada di posisi ke-34 dengan indeks sebesar 89,31 dan Provinsi Jambi berada di posisi ke-32 dengan indeks sebesar 92,53.

BAB 4 KESIMPULAN

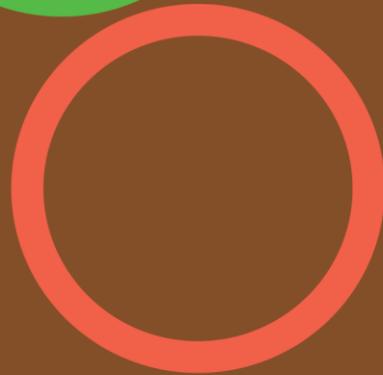
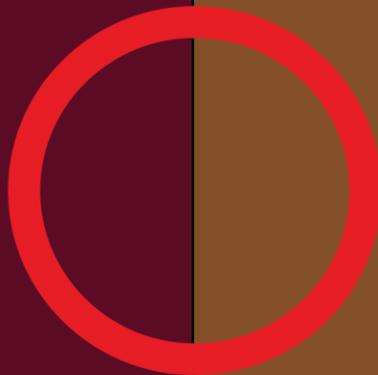
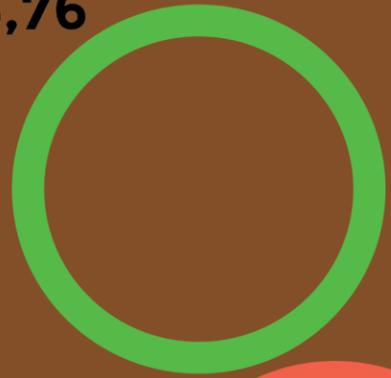
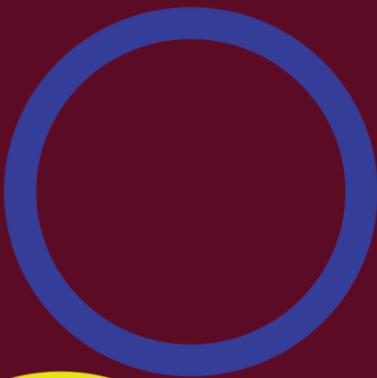
1

IKK merupakan variabel yang digunakan di dalam penghitungan DAU (Dana Alokasi Umum)

2

IKK adalah spatial indeks yang dibandingkan antar wilayah.

IKK Kabupaten Kaur Tahun 2018 sebesar 96,91 lebih tinggi dari IKK Provinsi Bengkulu sebesar 96,76



BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2004.
2. IKK merupakan *spatial index*, yang digunakan untuk membandingkan antarwilayah, namun bukan perbandingan antarwaktu. Setelah dilakukan penghitungan, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2018 yaitu sebesar 96,91 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKK Provinsi Bengkulu sebesar 96,76. Jika dibandingkan dengan Kota Semarang sebagai kota acuan sebesar 100,00, IKK Kabupaten Kaur lebih rendah. Nilai tersebut menempatkan Kabupaten Kaur pada posisi kelima dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu jika diurutkan dari terbesar ke terkecil.

LAMPIRAN

<https://kbrkab.bps.go.id>

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur, 2018

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)
	(km ²)	(%)	Jumlah	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nasal	519,92	21,99	16.890	14,08	32,49
Maje	361,04	15,27	13.252	11,05	36,71
Kaur Selatan	92,75	3,92	15.419	12,85	166,24
Tetap	87,4	3,70	6.525	5,44	74,22
Kaur Tengah	26,40	1,12	4.862	4,05	184,15
Luas	124,88	5,28	5.370	4,48	43
Muara Sahung	256,00	10,83	6.064	5,05	23,69
Kinal	154,03	6,51	4.754	3,96	30,86
Semidang Gumay	64,91	2,75	6.013	5,01	92,64
Tanjung Kemuning	72,91	3,08	11.778	9,82	161,54
Kelam Tengah	35,84	1,52	6.894	5,75	192,35
Kaur Utara	49,80	2,11	7.154	5,96	143,65
Padang Guci Hilir	115,96	4,90	3.994	3,33	34,44
Lungkang Kule	32,00	1,35	3.600	3,00	112,5
Padang Guci Hulu	370,64	15,68	7.384	6,16	19,92
Jumlah	2.364,48	100,00	119.951	100,00	50,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Pembiayaan, Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas di Kabupaten Kaur, 2013-2018 (km)

Jenis Jalan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pembiayaan	719,30	653,494	653,494	653,494	653,494
a. Jalan Negara	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25
b. Jalan Provinsi	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30
c. Jalan Kabupaten	514,02	447,944	447,944	447,944	447,944
2. Jenis Permukaan	719,30	653,494	653,494	578,540	578,540
a. Aspal	290,42	340,213	373,355	241,230	239,002
b. Kerikil	396,42	160,228	160,228	159,480	152,829
c. Tanah	32,46	153,050	119,911	177,830	171,761
d. Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	14,948
3. Kondisi	719,30	653,494	653,494	578,540	578,540
a. Baik	399,56	352,654	386,817	220,960	137,047
b. Sedang	175,00	96,860	96,860	97,520	77,144
c. Rusak	94,09	88,223	88,223	108,940	173,678
d. Rusak Berat	50,65	115,758	81,594	151,120	190,671
4. Kelas	719,30	653,494	653,494	578,540	518,540
a. Kelas I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Kelas II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Kelas III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Kelas III A	70,65	85,25	85,25	0,00	0,00
e. Kelas III B	0,00	120,300	120,300	0,00	0,00
f. Kelas III C	0,00	134,663	167,805	529,240	518,540
g. Kelas Tdk	648,65	313,281	280,139	49,300	0
Dirinci					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2015-2018

Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah	16.379,42	30.022,31	34.261,51	38.688,34
a. Pajak Daerah	4.727,71	8.043,08	6.246,47	9.392,81
b. Retribusi Daerah	1.453,95	9.477,61	1.684,41	1.487,22
c. Bagian Laba BUMD	3.092,15	2.839,00	2.762,71	2.416,19
d. Penerimaan Lain-lain	7.105,61	9.662,61	23.567,91	25.392,12
2. Dana Perimbangan	602.451,46	669.635,00	564.143,95	551.555,37
a. Bagi Hasil Pajak	11.961,72	13.676,83	8.827,15	6.257,94
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	16.274,84	7.124,15	4.547,82	6.279,33
c. Dana Alokasi Umum	393.623,58	441.587,14	433.937,04	435.518,39
d. Dana Alokasi Khusus	180.591,32	207.246,88	116.831,93	103.499,70
e. Dana Tunjangan Pend.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pendapatan Daerah yang Sah	113.350,96	201.238,86	163.983,43	160.293,08
a. Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	21.059,57	17.950,44	18.684,95	21.075,66
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.153,15	69.099,72	0,00	9.250
e. Bantuan Keu. dari Prov	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Pendapatan Lainnya	0,00	114.188,70	145.298,48	129.967,42
Jumlah	732.181,85	900.896,17	762.388,89	750.536,79

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kaur

Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2015-2018

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Tidak Langsung	321.596,80	371.530,32	422.792,41	407.824,13
a. Belanja Pegawai	230.432,76	230.352,49	247.588,23	248.811,42
b. Belanja Bunga	3,23	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Hibah	16.312,98	2.444,6	2.697,2	2.055,2
e. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0	0
f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Belanja Bantuan Keu. kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	74.847,84	138.733,23	172.506,97	156.238,79
h. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Langsung	398.885,38	515.358,92	360.740,08	330.132,54
a. Belanja Pegawai	18.046,82	23.448,34	12.570,19	16.299,49
b. Belanja Barang dan Jasa	146.177,81	203.057,29	187.112,97	222.765,33
c. Belanja Modal	234.660,76	288.853,28	161.056,92	91.067,71
Jumlah	534.064,96	720.482,19	886.889,24	737.956,67

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kaur



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR**

Jl Peltu M Ilyas, T. Panji Alam, Padang Kempas Bintuhan
Telp. (0739) 6180009-10, Fax. (0736) 6180002
Homepage://kaurkab.bps.go.id, Email: bps1704@bps.go.id